

KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
<i>E-learning Dasar-Dasar Legal Drafting</i>	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-learning</i> ini bertujuan untuk membekali pegawai dengan pengetahuan terkait dengan konsep, landasan teori, asas, dan kaidah yang diperlukan untuk perancangan hukum (<i>legal drafting</i>) sesuai lingkup kerjanya, serta sebagai pondasi awal guna mengikuti pembelajaran <i>legal drafting</i> tingkat selanjutnya.</p> <p>Selama proses pembelajaran peserta akan memperoleh pemaparan materi terkait: jenis, hierarki, muatan, dan proses pengundangan peraturan perundang-undangan; proses penyusunan Naskah Akademik, teknik penyusunan peraturan peraturan Perundang-undangan, legislasi semu, dan teknik PMK, KMK, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan Unit; dan pengenalan metode analisis dampak implementasi peraturan perundang-undangan (<i>Regulatory Impact Analysis</i> atau RIA, dan <i>Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology</i> atau ROCCUPI). Penyampaian materi dilakukan dengan metode pembelajaran <i>asynchronous</i> mandiri dan difasilitasi melalui <i>platform Kemenkeu Learning Center (KLC)</i> yang menuntut inisiatif dan keaktifan peserta selama proses pembelajaran.</p> <p>Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dan retensi pengetahuan materi yang telah dipelajari, peserta akan diberikan penugasan untuk menjelaskan implementasi konsep-konsep <i>legal drafting</i> di lingkungan unitnya dan tes formatif di akhir setiap mata pelajaran.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p>Pemahaman yang utuh mengenai <i>legal drafting</i> sangat penting bagi para praktisi hukum di berbagai sektor, khususnya di pemerintahan. Bagi lembaga pemerintah, <i>legal drafting</i> bertujuan memastikan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam produk hukum unit kerja dapat dipatuhi dan dilaksanakan, sesuai kaidah, norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlindungi oleh hukum yang ada, serta menghindari adanya pembatalan dan duplikasi dengan aturan yang lain.</p> <p><i>E-Learning</i> ini merupakan langkah pertama bagi pegawai yang ingin mempelajari <i>legal drafting</i> melalui pemberian konsep, landasan teori, asas, dan kaidah <i>legal drafting</i> yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, <i>e-learning</i> ini dapat pula dimanfaatkan oleh pegawai untuk memperbaharui dan memperkuat pengetahuan yang dimiliki terkait dengan <i>legal drafting</i>.</p>
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya yang ditugaskan oleh unit yang bersangkutan. <i>E-Learning</i> diutamakan untuk	

dapat diikuti oleh pegawai yang berasal dari unit yang menyusun Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, dan akan mengikuti pembelajaran terkait dengan *legal drafting* tingkat selanjutnya.

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA
- e-Learning (asynchronous penuh)*
 - Bimbingan di tempat kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai Swasta
 - Webinar (Web Seminar)*
 -

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan jenis, hierarki, muatan dan proses pengundangan peraturan Perundang-undangan;
2. Menjelaskan proses penyusunan Naskah Akademik, teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan, legislasi semu, dan teknik PMK, KMK, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan Unit;
3. Menjelaskan metode analisis dampak implementasi peraturan perundang-undangan

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan jenis, hierarki, muatan dan proses pengundangan peraturan Perundang-undangan;
 - a. menjelaskan Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
 - b. menjelaskan proses Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan
2. Menjelaskan proses penyusunan Naskah Akademik, teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan, legislasi semu, dan teknik PMK, KMK, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan Unit;
 - a. mengidentifikasi Kerangka, Substansi, Sistematika, dan Simulasi Penyusunan Naskah Akademik
 - b. menjelaskan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden) terkait Kerangka, Perumusan Norma dan Ragam Bahasa Hukum
 - c. meninjau Legislasi Semu;

- d. menjelaskan teknik Penyusunan, Harmonisasi, Penetapan, dan Pengundangan PMK, KMK, Peraturan dan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
3. Menjelaskan metode analisis dampak implementasi peraturan perundang-undangan;
- mengidentifikasi dampak implementasi peraturan menggunakan metode RIA; dan
 - mengidentifikasi dampak sosial implementasi peraturan menggunakan metode ROCCIPI.

LAMA PROGRAM EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1.	Mata Pelajaran Pokok	a. Pengenalan Jenis, Hierarki, Muatan dan proses pengundangan peraturan Perundang-undangan	-	4	4	1
		b. Pengenalan Naskah Akademik, <i>Legal Drafting</i> Peraturan Perundangan, Legislasi Semu, dan <i>Legal Drafting</i> PMK, KMK, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan UE I	-	4	4	2
		c. Pengenalan Analisis Dampak Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	3	3	3
2.	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-	-	
3.	Ceramah	-	-	-	-	
4.	PKL	-	-	-	-	
5.	<i>Outbond</i>	-	-	-	-	
6.	MFD	-	-	-	-	
7.	Pengarahan Program	-	-	-	-	
8.	<i>Action Learning</i>	-	-	-	-	
TOTAL JP			11 JP			
DILAKSANAKAN DALAM (hari efektif)						

<input type="checkbox"/> Studi Mandiri : 4 <input type="checkbox"/> Tatap Muka : - <input type="checkbox"/> Action Learning : - - Mandiri : - - Tatap Muka : - Lama Diklat Efektif Empat hari efektif non-tatap muka dengan bantuan fasilitas <i>integrated online learning platform</i> (yang meliputi namun tidak terbatas pada KLC).	4 hari efektif
JENIS DAN JENJANG PROGRAM	
<i>E-learning</i> Dasar-Dasar Legal Drafting merupakan pelatihan teknis yang berjenjang dasar.	
PERSYARATAN PESERTA	
Administrasi Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Kompetensi - Lain-Lain 1. Melengkapi diri dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (<i>Desktop Computer, PC, laptop</i>); dan 2. Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran.	
KUALIFIKASI PENGAJAR	
Umum 1. Profesional/Praktisi di bidangnya; dan/atau 2. Mendapat persetujuan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum. Khusus 1. Menguasai materi yang akan diajarkan dan/atau keahlian tertentu; dan/atau 2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT. Catatan Kualifikasi ini dapat dikecualikan bagi moderator forum diskusi.	
BENTUK EVALUASI	
EVALUASI LEVEL 1 Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Tatap Muka, dan Evaluasi Pengajar/Narasumber tertulis/ <i>online</i> sebagaimana diatur dalam ketentuan BPPK.	
EVALUASI LEVEL 2 <i>E-Learning</i> ini bersifat non-kelulusan. Namun demikian untuk mengetahui peningkatan pengetahuan peserta akan diberikan tes formatif dan penugasan. Peserta wajib menyelesaikan tes formatif (non-kelulusan) pada setiap mata pelajaran dengan nilai minimal 80 skala 100 untuk tiap unit, dengan rincian jumlah soal:	

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal	Waktu
1.	Pengenalan Jenis, Hierarki, Muatan dan proses pengundangan peraturan Perundang-undangan	10 Soal	15 menit
2.	Pengenalan Naskah Akademik, <i>Legal Drafting</i> Peraturan Perundangan, Legislasi Semu, dan <i>Legal Drafting</i> PMK, KMK, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan UE I	10 Soal	15 menit
3.	Pengenalan Analisis Dampak Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Soal	15 menit

Ketentuan lain terkait tes formatif ini meliputi:

1. Kesempatan *retake* maksimal adalah 5 kali untuk tiap unit tes formatif;
2. *Badge* adalah bukti sah peserta telah menyelesaikan *e-learning* yang ditampilkan didalam *integrated online learning platform* yang tidak menggantikan sertifikat keikutsertaan yang diterbitkan setelah peserta menyelesaikan seluruh tahapan *e-learning*; dan
3. Sertifikat keikutsertaan diberikan setelah peserta menyelesaikan seluruh tahapan dan mengakhiri *e-learning*.

Selain tes formatif, pada setiap subbab peserta akan diberikan penugasan reflektif berupa pertanyaan terbuka terkait bagaimana dengan penerapan materi tersebut di unitnya dan apakah terdapat pertanyaan terkait materi tersebut (yang dapat didiskusikan pada saat PJJ *Legal Drafting*).

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

1. Materi pembelajaran diberikan melalui *integrated online learning platform* (yang meliputi namun tidak terbatas pada KLC);
2. *E-Learning* ini dapat bersifat *open course* untuk seluruh ASN di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kebutuhan lain selama proses pembelajaran disesuaikan dengan hasil kesepakatan pada rapat persiapan;

LAIN-LAIN

1. Peserta akan menerima materi pembelajaran dengan format digital yang telah disusun secara terstruktur pada *platform* KLC;
2. Peserta dapat mendiskusikan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi yang telah diberikan melalui saluran yang diakomodir oleh *platform* KLC dan/atau pihak penyelenggara dan/atau menjadi masukan diskusi untuk pembelajaran terkait *legal drafting* di tingkat selanjutnya; dan
3. Peserta wajib memberikan *review* dan *rating* untuk program *e-learning* yang diselesaikan melalui *course reviews* di KLC.

Keterangan

E-Learning ini merupakan program pembelajaran baru pada tahun 2022 dan merupakan *e-learning* prasyarat untuk mengikuti PJJ *Legal Drafting*. Dengan adanya penyampaian materi yang bersifat statis dan/atau teori kedalam *E-Learning* ini, harapannya dapat menyeragamkan pengetahuan dasar peserta sebelum mengikuti PJJ, memperkaya diskusi yang ada selama kelas PJJ, dan meng Adapun penyusunan desain pembelajaran telah dibahas dalam Rapat Reviu Desain Pembelajaran PJJ *Legal Drafting* pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan UND-916/PP.7/2021, UND-917/PP.7/2021, UND-918/PP.7/2021, UND-919/PP.7/2021, UND-920/PP.7/2021, dan UND-921/PP.7/2021. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, Widyaiswara pengelola program, dan DJPb (Sekretariat dan DSP DJPB) selaku *Skill Group Owners* (SGO) dan *stakeholder* AKP Strategis pelatihan tersebut, serta perwakilan Biro Hukum Sekretariat Jenderal, BPHN KemenkumHAM, dan Direktorat PP KemenkumHAM selaku *Subject Matter Expert* (SME) terkait dengan program pembelajaran dimaksud, Adapun finalisasi desain pembelajaran dilakukan setelah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan SGO, SME dan Widyaiswara pengelola program terkait. (CG)

Jakarta, 7 Januari 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati